

Abstrak

Skripsi ini disusun oleh **Irsadul Fikri** dengan **Nim 3221140** Program Studi ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Mengangkat judul skripsi **Analisis Sistem Upah Buruh Tani Di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya penundaan upah pada buruh tani setelah pekerjaan selesai dan ada pemilik lahan membayar upah ke buruh tani sampai masa panen padi. dan tenaga yang dikeluarkan saat bekerja tidak sebanding dengan upah yang diterima buruh tani, pekerjaan bergantung kepada musiman sehingga Kondisi ini menimbulkan kesenjangan ekonomi dan merusak martabat kemanusiaan buruh tani, yang seharusnya dijaga dalam perspektif ekonomi islam.

Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap sistem pemberian upah buruh tani di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Sistem pengupahan buruh tani di Nagari Taeh Baruah dilaksanakan dengan berbagai metode, antara lain sistem upah perjam, harian, dan sistem upah borongan. Namun, dalam praktiknya ditemukan beberapa permasalahan seperti keterlambatan pembayaran upah oleh pemilik lahan, tenaga yang ekstra dikeluarkan saat bekerja tidak sebanding dengan upah diterima, serta kurangnya kejelasan dan kesepakatan yang tertulis antara buruh tani dan pemilik lahan. Hal ini menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem pengupahan seharusnya didasarkan pada prinsip (tauhid) mencerminkan keyakinan bahwa segala aktivitas ekonomi dilakukan sebagai pengabdian kepada Allah, prinsip (keadilan) upah diberikan sesuai beban kerja, tidak merugikan salah satu pihak, dilakukan transparan, prinsip (nubuwwah) pemilik lahan diharapkan meneladani akhlak Rasulullah SAW, prinsip (khalifah) pemerintah berperan menetapkan kebijakan pengupahan yang adil, pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan dan menciptakan sistem menjamin kesejahteraan, prinsip (tanggung jawab) seluruh pihak, baik pemilik lahan, buruh maupun pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjalankan sistem pengupahan. Realitas yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistem yang lebih berpihak kepada kesejahteraan buruh tani serta sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci : sistem upah, keadilan, ekonomi islam